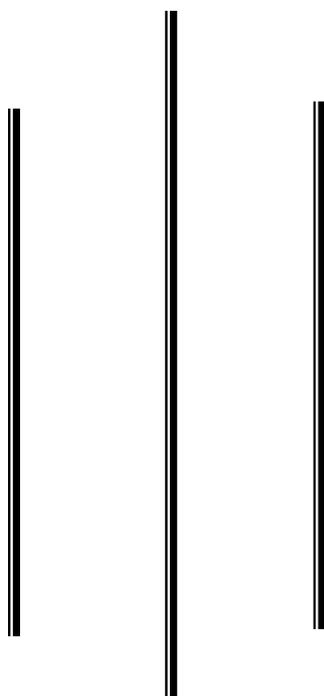




**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKIP)
KECAMATAN PARINGIN SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

Daftar isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Struktur Organisasi.....	3
1.5. Keadaan Pegawai / Personil.....	3
Bab II Perencanaan Kinerja	6
2.1 Perencanaan Kinerja.....	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Akuntabilitas Kinerja.....	20
3.2 Realisasi Anggaran	42
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	52
3.4 Analisis Kinerja Lainnya	53
Bab IV Penutup	57

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Paringin Selatan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Paringin Selatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Paringin Selatan tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Paringin Selatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Paringin Selatan, Januari 2025

CAMAT PARINGIN SELATAN,

RIZA KURNIAWAN, S.STP., M.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19870328 200602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Paringin Selatan terbentuk pada tanggal 18 Desember 2006 berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Karena tugas yang diemban oleh Kecamatan Paringin Selatan cukup berat, maka agar dapat berhasil diperlukan adanya Rencana Kinerja (Renja) Camat Paringin Selatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Paringin Selatan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) berupa Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam tahun 2024.

Renja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024, kemudian pada setiap akhir tahun disempurnakan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam sebuah LAKIP dapat dilihat aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur dalam komitmen bagi Kantor Kecamatan Paringin Selatan untuk pencapaian dalam tahun 2024.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini disebabkan dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Paringin Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3 Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023).

10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 83).

1.3. Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Paringin Selatan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan dan Sub kegiatan di tahun 2024. Ada pun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Paringin Selatan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Paringin Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan Kecamatan mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

- g. Mengoordinasikan, dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- h. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan;

1.4.1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- g. Seksi Pelayanan Publik dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretariat
- c. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- d. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1.4.2. Keadaan Pegawai / Personil

Keadaan pegawai Kantor Kecamatan Paringin Selatan dapat dilihat dari tabel dan data berikut ini :

Tabel 1.1**Personalia Kantor Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024**

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1
4	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1
5	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1
6	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	1
7	Kasi Pelayanan Publik	1
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1
9	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1
10	Staf Administrasi/Teknis	12
13	TKS	26
Jumlah Pegawai		43

Sumber : Sekretariat Kecamatan Paringin Selatan, Desember 2024

Keterangan :

- PNS : 17 orang
- TKS : 30 orang

Tabel 1.2**Personalia Kantor Kelurahan Batu Piring Tahun 2024**

No	Jabatan	Jumlah
1	Lurah	1
2	Sekretaris Lurah	1
3	Seksi Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1
4	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	1
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1
6	Staf Administrasi/Teknis	3
7	TKS	8
Jumlah Pegawai		16

- Sumber : Sekretariat Kelurahan Batu Piring, Desember 2024
- Keterangan :
- PNS : 6 orang
 - TKS : 8 orang

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai, Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT	JLH (ORG)	GOL.	JLH (ORG)
KANTOR	25	SD	I/d	1	I	1
KECAMATAN		SLTP	I/d	1	I	1
PARINGIN		SLTA	II	4	III	1
SELATAN dan		D1	I	0	III	1
KELURAHAN		S1	III	11	IV	5
BATU PIRING		S2	III/a	0	IV	2

Sumber : Sekretariat Kec. Paringin Selatan dan Kel. Batu Piring, Desember 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Paringin Selatan mendukung pelaksanaan Misi IV yaitu Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan Kualitas Layanan Birokrasi Pemerintahan pada Kecamatan Paringin Selatan.

Laporan Kinerja Kecamatan Paringin Selatan tahun 2024 mengacu pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paringin Selatan 2021 - 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024.

2.1.1. Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 -2026

Tujuan Strategis Kecamatan Paringin Selatan sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Seksi pada Kecamatan Paringin Selatan.

Untuk mencapai Tujuan Strategis tersebut, maka ditentukan Sasaran Strategis Kecamatan Paringin Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Di bawah ini disajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Paringin Selatan berikut Indikator dan Targetnya.

Tabel 2.1**Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			-	-	87	88	89	90
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	85	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	-	75	75	75	75
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%

2.1.2. Renja Kerja (RENJA)

Rencana Kerja tahun 2024 Kecamatan Paringin Selatan terdiri dari 6 Program dengan 14 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan pada Tahun 2023 sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2**Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	71.42 Nilai	5.827.719.094
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	4 Dokumen	2.727.100

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	
	Daerah	Evaluasi Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.727.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku	14 Bulan	4.909.268.094
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	4.873.008.094
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.260.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	23.443.300
4.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	23.443.300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	375.654.700
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.324.700

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.026.000
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	327.304.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Unit	48.859.400
8.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	11.317.600
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	37.541.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	322.518.700
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.176.800
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	242.341.900
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53 Unit	145.247.800

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	127.847.800
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	17.400.000
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Paringin Selatan	86 Nilai	43.560.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	1 Laporan	43.560.000
14.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	43.560.000
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan	100%	1.668.893.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	234.300.000
15.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	234.300.000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan	100%	1.323.281.000
16.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.700.000
17.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang Terbangun	2 Unit	785.770.400
18.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	454.470.600
19.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	79.340.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	111.312.500
20.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	111.312.500

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	100%	26.620.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	26.620.000
21.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	26.620.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	114.129.100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	114.129.100

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	
22.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	114.129.100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	122.470.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	122.470.000
23.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	71.000.000
24.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	14.520.000
25.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	36.950.000
Jumlah Anggaran dari seluruh Program			7.803.391.694	

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin Selatan setelah dilakukannya Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading terbaru, yang juga merupakan Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD. Berikut disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021-2026 yang dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024
Tujuan SKPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<p>Makna Indikator : Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Paringin Selatan terhadap pelayanan yang diberikan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Indeks</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial

			<p>Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Sumber/Referensi</p> <p>Indikator:</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>		
2	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	<p>Makna Indikator :</p> <p>Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Sebagai sarana bagi Kecamatan Paringin Selatan dalam meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>Formulasi</p> <p>Perhitungan:</p> <p>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan</p>	Kepala SKPD (Camat)	Sekse Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

			<p>Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>Sumber/Referensi Indikator:</p> <p>Analisa Mandiri</p>		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	<p>Makna Indikator :</p> <p>Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Sebagai Indikator bagi Kecamatan Paringin Selatan dalam menjaga Kondusi-fitas Wilayah</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator:</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Ketentraman dan Katertiban Umum

			Analisa Mandiri		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	<p>Makna Indikator :</p> <p>Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Sebagai Indikator bagi Kecamatan Paringin Selatan dalam memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Formulasi</p> <p>Perhitungan :</p> <p>Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <p>Analisa Mandiri</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pemerintahan
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	<p>Makna Indikator :</p> <p>Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>Alasan Pemilihan :</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pembangunan

			<p>Sebagai Indikator bagi Kecamatan Paringin Selatan dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 7 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <p>Analisa Mandiri</p>		
--	--	--	---	--	--

2.1.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, maka Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK)
Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	88
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif	75
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Pemerintah	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Paringin Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Paringin Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan pencapaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Kategori Capaian Kinerja SKPD

URUTAN	RENTANG CAPAIAN KINERJA		KATAGORI CAPAIAN KINERJA
I	≥ 100		Sangat berhasil
II	≥ 90	≤ 99	Berhasil
II	≥ 80	≤ 90	Cukup Berhasil
IV	≥ 80		Kurang Berhasil

Berikut Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024, yaitu:

3.1.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik

Untuk Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Strategis yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1.

Analisis Pencapaian Tujuan Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	100,63%	88	84,53	96,05%	90	93,92%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	95,67%

Indikator Kinerja dari Tujuan Strategis Kecamatan Paringin Selatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh seksi pada Pemerintah Kecamatan Paringin Selatan. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud baru ada setelah dilakukan Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading pada Akhir Tahun 2023, sehingga Realisasi Kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Kinerja Tujuan Utama Tahun 2024 tidak memenuhi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial (sebagai Pengumpul Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dari seluruh seksi), maka yang menjadi penyebab rendahnya Realisasi Kinerja dan rendahnya Capaian Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023, adalah bahwa ada 3 (tiga) Unsur Pengukuran Kepuasan Masyarakat yang nilainya rendah pada Tahun 2024, yaitu :

1. Unsur 5, yaitu Produk Spesifikasi Jenis Layanan.
2. Unsur 6, yaitu Kompetensi Pelaksana.
3. Unsur 9, yaitu Sarana dan Prasarana.

Ketiga unsur tersebut terdapat pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Seksi Pelayanan Publik, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 Semester I Ketiga Unsur tersebut menurun nilainya, walaupun pada Semester II ketiga unsur tersebut kembali mengalami penurunan nilai. Akan tetapi kalau diakumulasikan antara Nilai Semester I dan Nilai Semester II, maka Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 menurun dibandingkan dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 3.1.1., maka Capaian Kinerja dari Tujuan Strategis Kecamatan Paringin Selatan untuk Tahun 2024 masuk ke dalam kategori Berhasil.

Ada beberapa rencana aksi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis dimaksud, yaitu dengan meningkatkan nilai dari ketiga unsur di atas, berupa :

- a. Meningkatkan Kapasitas Petugas Layanan, yaitu dengan melakukan konsultasi ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan atau SKPD lainnya, serta menambah pengetahuan dengan membaca regulasi dan aturan terkait pelayanan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan Nilai Unsur 5 yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Nilai Unsur 6 yaitu Kompetensi Pelaksana.
- b. Menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang dari seluruh seksi kepada Kepala SKPD, berupa Sarana dan Prasarana Pelayanan. Yaitu Pembangunan Ruang Laktasi maupun Penyediaan Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas. Dengan hal tersebut diharapkan Nilai Unsur 9 (Sarana dan Prasarana) bisa lebih meningkat.

3.1.2. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat

Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I yaitu Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	100,63%	88	84,53	96,05%	90	93,92%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	95,67%

- a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024, adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semester I dan Semester II. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2024 adalah sebesar 81,07, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 Semester II sebesar 88. Sehingga capaian menurun dari

target yaitu sebesar 96,05%. Rasio capaiannya termasuk dalam kategori **Berhasil**.

- b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022

Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Untuk Tahun 2022, Realisasi Kinerja adalah sebesar 85,31 dari Target Kinerja sebesar 86. Sedangkan untuk Capaian Kinerja adalah sebesar 99,20%.

Sedangkan untuk Tahun 2023, Realisasi Kinerja sebesar 87,91 dengan Target Kinerja sebesar 87, atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100,63%.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial pada Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paringin Selatan adalah sebesar 90. Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sebesar 84,53, maka Capaian Kinerja terhadap Target Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) adalah sebesar 97,27% yang artinya masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tahun berikutnya agar target akhir tahun renstra dapat dicapai sesuai harapan

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Dikarenakan dengan tidak adanya data pembanding antara Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024, baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja secara Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun factor penghambat kurangnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Paringin Selatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kurangnya Sarana dan Prasarana Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Kecamatan Paringin Selatan masih sangat jauh dari sarana dan prasarana yang menunjang dalam hal standar pelayanan kepada masyarakat, itu dikarenakan belum adanya fasilitas meja pelayanan yang sesuai standar pelayanan, belum adanya ruang lansia, ruang disabilitas, ruang ibu menyusui maupun fasilitas ruang alat permainan edukatif (APE).
- Kurangnya upaya peningkatan SDM petugas layanan, Hal ini dapat dilihat dengan masih kurangnya petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai standar yang menyebabkan masyarakat merasa kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan akibat kekurangan kemampuan pelayanan prima petugas pelayanan seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, ketersediaan data dan etika pelayanan. Tidak tersedianya dana untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas pelayanan melalui pelatihan tentang pelayanan prima dan peraturan perundang-undangan pelayanan juga mempengaruhi kurangnya upaya peningkatan SDM petugas layanan di Kecamatan Paringin Selatan
- Kurangnya dana tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi mengenai pelayanan kecamatan kepada Masyarakat

Solusi Yang Akan Dilakukan Yaitu :

- Melakukan penambahan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasana yang sesuai dengan standar pelayanan
- Menyediakan dana yang memadai untuk melaksanakan sosialisasi pelayanan kecamatan bagi masyarakat di Kecamatan Paringin Selatan sehingga tidak ada lagi kesalahfahaman dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Paringin Selatan.
- Peningkatan Kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk mendukung optimalisasi sumber daya

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.2.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	88	84,54	96,06%	262.577.300	251.210.000	95,671%	0,41%

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja sudah lumayan, karena dengan melakukan Efisiensi Anggaran sebesar 0,41%. Apalagi Sebagian besar Pagu Anggaran digunakan untuk merealisasikan Kegiatan Penunjang yang Wajib dilaksanakan, seperti Pelaksanaan Safari Ramadhan, Pelaksanaan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan, Pengiriman Kafilah MTQ ke Kabupaten.

Perhitungan untuk Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

Tabel 3.1.3.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7	01	02	202	02	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Di bawah ini adalah dokumentasi dari kegiatan dimaksud :



Serapan Anggaran dalam rangka mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Strategis I di atas adalah sebesar 95,67%. Yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 251.210.000,- dengan pagu anggaran Rp. 262.577.300,-.

3.1.3. Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.4

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	100,00%	75	75	100,00%	75	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	96,14%

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada Tahun 2024 adalah sebanyak 75 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Rasio Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 75 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dengan target sebesar 75 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Rasio capaiannya termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Ditetapkannya Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai konsekuensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023. Sehingga hal ini yang menyebabkan Realisasi dan Capaian Kinerjanya hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, dengan Target Kinerja sebanyak 75 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Realisasi Kinerja yang bisa dicapai adalah sebanyak 75 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif. Realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 maka realisasi kinerja ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Dikarenakan Target Kinerja Tahun 2026 atau Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Target Kinerja Tahun N-1, Tahun N dan Tahun N+1, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 itu sendiri, yaitu 100%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Dikarenakan dengan tidak adanya data pembanding antara Realisasi Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024, baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada

Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun faktor yang menyebabkan rasio Capaian Kinerja tersebut bisa maksimal adalah :

1. Sudah selarasnya antara Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), walaupun dari sisi Belanja belum mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud.
2. Adanya koordinasi antara Kecamatan dengan desa-desa terkait keaktifkan Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) sehingga LKD yang ada di Desa bisa aktif dan terkoordinir dengan baik
3. Akan dilaksanakan pembinaan/sosialisasi terhadap LKD yang ada di Desa
4. Semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) teradministrasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa.

Lembaga kemasyarakatan desa yaitu wadah partisipasi Masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan Masyarakat Desa.

Solusi yang akan dilakukan penguatan kapasitas sumber daya dan kemampuan Lembaga untuk memelihara Tingkat partisipasi aktif, menerapkan mekanisme monitoring yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan aktifnya LKD, dan mendukung keaktifan LKD dalam berbagai kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

- f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	75	75	100,00%	1.715.693.500	1.662.422.700	96,90%	3,10%

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja sudah lumayan, walaupun hanya sebesar 3,10%, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Perhitungan untuk Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	01	03	201	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7	01	03	202	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7	01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	01	03	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7	01	03	202	04	Evaluasi Kelurahan
7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7	01	03	206	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Solusi yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas TP PKK Desa agar Desa lebih tertib administrasi dan meningkatkan peran serta dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di desanya. Serta Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar bisa lebih berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan di Kecamatan:



Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 96,90%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.662.422.700,- dengan Pagu Anggaran Rp. 1.715.693.500,-.

3.1.4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan

Untuk Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.7.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Wilayah Kecamatan

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	98,78%

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Rasio capaiannya termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Ditetapkannya Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan adalah sebagai konsekuensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023. Sehingga hal ini yang menyebabkan Realisasi dan Capaian Kinerjanya hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, Target Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani adalah sebesar 100%, dengan Realisasi Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Sehingga Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dikarenakan Target Kinerja Tahun 2026 atau Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Target Kinerja Tahun N-1,

Tahun N dan Tahun N+1, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 itu sendiri, yaitu 100%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Dikarenakan dengan tidak adanya data pembanding antara Realisasi Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024, baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun faktor pendorong keberhasilan dari Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024, adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (Man) yang mumpuni dan Sumber Daya Anggaran (Money) yang mencukupi pada Kecamatan Paringin Selatan. Serta sudah selarasnya antara Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Strategis 3 ini. Selanjutnya ada juga faktor harmonisnya jalinan hubungan Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Sehingga setiap ada kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) selalu bersinergi dalam melakukan penanganan.

Solusi yang akan dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan membantu pencapaian target, penguatan Kerjasama anatara aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan Masyarakat dalam menangani gangguan juga berperan penting dalam pencapaian kinerja.

- f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.8.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100,00%	152.895.000	150.917.000	98,71%	1,29%

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja cukup rendah, karena hanya sebesar 1,29. Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Perhitungan untuk Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- g. Analisis atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7	01	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan), adalah dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan

(Forkopimcam) dengan seluruh Pemerintahan Desa dan Instansi lainnya, yang rutin dilaksanakan setiap bulan.

Selain untuk mempererat jalinan hubungan antar Instansi/Lembaga Pemerintah di Kecamatan Paringin Selatan, pada kegiatan ini juga biasanya dibicarakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi/Lembaga Pemerintah di Kecamatan Paringin Selatan. Sekaligus menjadi tempat pemecahan masalah.

Dibawah ini adalah dokumentasi dari kegiatan tersebut:



Serapan Anggarannya adalah sebesar 98,70%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 150.917.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 152.895.000,-.

3.1.5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.10.

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/ Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	98,62%

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 100%, masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Ditetapkannya Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai konsekwensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023. Sehingga hal ini yang menyebabkan Realisasi dan Capaian Kinerjanya hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, Target Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan adalah sebesar 100%, dengan Realisasi Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Sehingga Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dikarenakan Target Kinerja Tahun 2026 atau Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Target Kinerja Tahun N-1, Tahun N dan Tahun N+1, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 itu sendiri, yaitu 100%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Seperti halnya Sasaran Strategis 2, yaitu dikarenakan dengan tidak adanya data pembanding antara Realisasi Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Tahun 2024, baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun faktor pendorong keberhasilan dari Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Tahun 2024. Selain dari tersedianya Sumber Daya Manusia (Man) yang mumpuni dan Sumber Daya Anggaran (Money) yang mencukupi pada Kecamatan Paringin Selatan.

Solusi yang akan dilakukan adalah peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dengan melakukan pelatihan maupun sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang tata Kelola administrasi yang baik dan benar, sosialisasi penyusunan LPP/LKPPD.

- f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.11.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100,00%	92.050.000	90.750.000	98,59%	1,41%

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja sudah cukup lumayan, yaitu sebesar 1,41%. Apalagi dengan Capaian Kinerja sebesar 100%, maka Efisiensi Penggunaan Anggaran menjadi berbanding lurus dengan Capaian Kinerjanya.

Perhitungan untuk Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- g. Analisis atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7	01	06	201	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Untuk meningkatkan capaian kinerja meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dengan melaksanakan peningkatan kapasitas anggota badan permusyawatan desa (BPD), sosialisasi tugas dan fungsi perangkat desa.

Berikut foto-foto kegiatan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa yang dilaksanakan :



Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 98,58%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 90.750.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 92.050.000,-.

Tabel 3.1.13.

**Analisis Pencapaian sasaran Strategis 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	-	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	98,62%

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan Target Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 100%, masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dengan ditetapkannya Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan, adalah sebagai konsekwensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023. Sehingga hal ini yang menyebabkan Realisasi dan Capaian Kinerjanya hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, Target Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan adalah sebesar 100%, dengan Realisasi Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Sehingga Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dikarenakan Target Kinerja Tahun 2026 atau Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Target Kinerja Tahun N-1, Tahun N dan Tahun N+1, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 itu sendiri, yaitu 100%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Sama halnya dengan Indikator Kinerja Pertama untuk Sasaran Strategis 4, yaitu dikarenakan dengan tidak adanya data pembanding baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun faktor yang menjadi pendorong keberhasilan dari Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Tahun 2024. Selain dari tersedianya Sumber Daya Manusia (Man) yang mumpuni dan Sumber Daya Anggaran (Money) yang mencukupi pada Kecamatan Paringin Selatan, juga bahwa Pemerintah Desa sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes

dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)). Sehingga Laporan Keuangan Desa baik Semester maupun Tahunan tersedia di sana.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan audit dan evaluasi berkaa terhadap pelaksanaan administrasi keuanan di desa-desa untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.14.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100,00%	166.753.600	164.563.600	98,69%	1,31%

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja sudah cukup lumayan, walaupun cuma sebesar 1,31%. Akan tetapi kalau melihat Capaian Kinerjanya yang sebesar 100%, atau masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Perhitungan untuk Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

g. Analisis atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

Tabel 3.1.15.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Untuk meningkatkan capaian kinerja ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes).

Berikut ini foto-foto kegiatan monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke desa dalam rangka pengawasan dan pembinaan administrasi keuanan desa :



Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 98,69%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 164.563.600,- dengan Pagu Anggaran Rp. 166.753.600,-.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Paringin Selatan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.985.604.589,- atau 87,35% dari pagu sebesar Rp.11.431.295.119,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada beberapa sub kegiatan yaitu sebesar 100%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yaitu 78,34% .

Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2024 sebagai berikut:

A. PAGU MURNI

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU MURNI	REALISASI	PERSENTASE
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.888.033.419	Rp. 4.008.786.150	58,20%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 19.402.700	Rp. 19.373.000	99,85%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 19.402.700	Rp. 19.373.000	99,85%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.443.374.419	Rp. 3.010.935.387	55,31%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.389.594.419	Rp. 2.976.135.387	55,22%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 53.780.000	Rp. 34.800.000	64,71%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 126.787.400	Rp. 58.326.000	46,00%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU MURNI	REALISASI	PERSENTASE
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 126.787.400	Rp. 58.326.000	46,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 552.303.700	Rp. 469.775.709	85,06%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 13.566.500	Rp. 13.289.400	97,96%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 55.647.500	Rp. 34.518.000	62,03%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 483.089.700	Rp. 421.968.309	87,35%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 596.543.300	Rp. 378.139.454	63,39%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 163.447.900	Rp. 71.373.622	43,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 433.095.400	Rp. 306.765.832	70,83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 149.621.900	Rp. 72.236.600	48,28%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 149.621.900	Rp. 72.236.600	48,28%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Rp. 248.913.300	Rp. 223.260.000	89,69%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU MURNI	REALISASI	PERSENTASE
PELAYANAN PUBLIK			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 248.913.300	Rp. 223.260.000	89,69%
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp. 51.330.000	Rp. 35.220.000	68,61%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Wilayah Kecamatan	Rp. 197.583.300	Rp. 188.040.000	95,17%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 1.991.583.200	Rp. 702.686.730	35,28%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 199.564.000	Rp. 99.350.000	49,78%
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 71.164.000	Rp. 27.350.000	38,43%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 128.400.000	Rp. 72.000.000	56,07%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 1.703.139.200	Rp. 546.582.900	32,09%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU MURNI	REALISASI	PERSENTASE
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp. 43.900.000	Rp. 21.700.000	49,43%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 154.121.000	Rp -	0,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 743.534.500	Rp. 329.207.000	44,28%
Evaluasi Kelurahan	Rp. 761.583.700	Rp. 195.675.900	25,69%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 88.880.000	Rp. 56.753.830	63,85%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp. 88.880.000	Rp. 56.753.830	63,85%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 104.356.000	Rp. 77.192.000	73,97%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 104.356.000	Rp. 77.192.000	73,97%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Rp. 104.356.000	Rp. 77.192.000	73,97%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU MURNI	REALISASI	PERSENTASE
Vertikal di Wilayah Kecamatan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 7.620.000	Rp. 7.534.000	98,87%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 7.620.000	Rp. 7.534.000	98,87%
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp. 7.620.000	Rp. 7.534.000	98,87%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 241.503.600	Rp. 136.203.600	56,40%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 241.503.600	Rp. 136.203.600	56,40%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 40.650.000	Rp. 27.850.000	68,51%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 155.953.600	Rp. 87.863.600	56,34%
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan	Rp. 44.900.000	Rp. 20.490.000	45,63%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU MURNI	REALISASI	PERSENTASE
dan Penegasan Batas Desa			
Jumlah	Rp. 9.482.009.519	Rp. 5.155.662.480	54,37%

B. PAGU PERUBAHAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8.254.500.419	Rp. 6.922.175.498	83,86%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 24.015.200	Rp. 23.985.500	99,88%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 24.015.200	Rp. 23.985.500	99,88%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.456.252.769	Rp. 4.288.906.685	78,61%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.389.774.769	Rp. 4.222.434.685	78,34%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 66.478.000	Rp. 66.472.000	99,99%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 65.683.800	Rp. 64.326.000	97,93%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 65.683.800	Rp. 64.326.000	97,93%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 815.258.700	Rp. 813.782.519	99,82%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 13.566.500	Rp. 13.289.400	97,96%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 55.647.500	Rp. 55.233.500	99,26%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 746.044.700	Rp. 745.259.619	99,89%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.181.827.500	Rp. 1.095.700.000	92,71%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 864.949.000	Rp. 793.500.000	91,74%
Pengadaan Mebel	Rp. 19.173.800	Rp. 18.800.000	98,05%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 297.704.700	Rp. 283.400.000	95,20%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 571.543.300	Rp. 506.096.894	88,55%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 138.447.900	Rp. 110.181.746	79,58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 433.095.400	Rp. 395.915.148	91,42%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 139.919.150	Rp. 129.377.900	92,47%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 139.919.150	Rp. 129.377.900	92,47%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 262.577.300	Rp. 251.210.000	95,67%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 262.577.300	Rp. 251.210.000	95,67%
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp. 57.830.000	Rp. 56.020.000	96,87%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Wilayah Kecamatan	Rp. 204.747.300	Rp. 195.190.000	95,33%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 2.502.518.800	Rp. 2.405.988.491	96,14%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 199.564.000	Rp. 192.364.000	96,39%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 71.164.000	Rp. 71.164.000	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 128.400.000	Rp. 121.200.000	94,39%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 2.174.828.800	Rp. 2.089.028.001	96,05%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp. 369.728.400	Rp. 360.134.801	97,41%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 154.121.000	Rp. 154.121.000	100,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 831.314.900	Rp. 797.835.000	95,97%
Evaluasi Kelurahan	Rp. 819.664.500	Rp. 776.937.200	94,79%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 128.126.000	Rp. 124.596.490	97,25%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp. 128.126.000	Rp. 124.596.490	97,25%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 145.275.000	Rp. 143.383.000	98,70%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 145.275.000	Rp. 143.383.000	98,70%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 145.275.000	Rp. 143.383.000	98,70%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 7.620.000	Rp. 7.534.000	98,87%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 7.620.000	Rp. 7.534.000	98,87%
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp. 7.620.000	Rp. 7.534.000	98,87%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 258.803.600	Rp. 255.313.600	98,65%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 258.803.600	Rp. 255.313.600	98,65%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 47.150.000	Rp. 45.850.000	97,24%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 166.753.600	Rp. 164.563.600	98,69%
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 44.900.000	Rp. 44.900.000	100,00%
Jumlah	Rp. 11.431.295.119	Rp. 9.985.604.589	87,35%

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Walaupun Efisiensi Penggunaan Sumber Daya telah dijelaskan pada masing-masing Sasaran Strategis di atas, tetapi akan kembali ditampilkan sebagaimana tabel di bawah. Hal ini agar lebih mudah memperbandingkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada masing-masing Sasaran Strategis.

Tabel 3.3.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	88	84,54	96,06%	262.577.300	251.210.000	95,671%	0,41%
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasya-rakatan Desa (LKD) yang Aktif	75	75	100,00%	1.715.693.500	1.662.422.700	96,90%	3,10%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keten-traman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100,00%	152.895.000	150.917.000	98,71%	1,29%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100,00%	92.050.000	90.750.000	98,59%	1,41%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Administrasi Keuangan	100%	100%	100,00%	166.753.600	164.563.600	98,69%	1,31%

Berdasarkan tabel di atas, maka bisa dilihat bahwa Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan

Indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif, adalah yang paling besar Efisiensi Penggunaan Sumber Dayanya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada masing-masing Sasaran Strategis di atas, bahwa perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) memakai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

3.4. Analisis Kinerja Lainnya

a. Kegiatan Administrasi Keuangan

Realisasi sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi capaian kinerja sebesar 78,34% dimana indikator kinerja dari kegiatan ini terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan PPPK. Rendahnya realisasi pada sub kegiatan ini dikarenakan kurang optimalnya perencanaan penganggaran dalam mengantisipasi mutasi masuk pegawai ASN (PNS dan PPPK), dan asumsi adanya pembayaran Tunjangan ASN diakhir tahun tidak terlaksana dimana tunjangan bulan desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi capaian kinerja sebesar 79,58% dimana indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Tidak terealisasi secara optimal dikarenakan perkiraan adanya kenaikan belanja terkait PDAM, Listrik dan internet karena adanya bangunan baru dan adanya kegiatan pembangunan dari pihak ketiga yang menggunakan fasilitas Listrik dan air dikecamatan.

PENGHARGAAN



Tabel 3.7
Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Tahun Sebelumnya
(LHE Tahun 2023)

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
A	Perencanaan Kinerja		
1	Untuk Menyempurnakan Diagram Crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	1	Menyempurnakan Diagram Crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja
B	Pengukuran Kinerja		
1	Untuk Nantinya Agar kedepannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat memberikan informasi efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan	1	Agar kedepannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat memberikan informasi efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan
C	Pelaporan Kinerja		
1	Untuk Menyusun Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) menginfokan perbandingan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	1	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) menginfokan perbandingan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
1		1	Membuat Laporan LKjIP yang mencakup perbandingan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk tabel Realisasi

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
2	Dapat Menyajikan kedepannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat menginformasikan mengenai efisiensi penggunaan sumber daya baik yang berkenaan dengan sumberdaya manusia atau anggaran	2 Agar kedepannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat menginformasikan mengenai efisiensi penggunaan sumber daya baik yang berkenaan dengan sumberdaya manusia atau anggaran	2 Menyajikan Data Kepegawaian dan Data Pagu Anggaran di dalam Dokumen Laporan LKjIP
3	Untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan rekomendasi perbaikan atas hambatan/kendala yang terjadi, terutama mengenai tujuan dan sasaran SKPD	3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan rekomendaasi perbaikan atas hambatan/kendala yang terjadi, terutama mengenai tujuan dan sasaran SKPD	3 Menyajikan Rekomendasi serta Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja dalam Dokumen Laporan LKjIP
4	Dapat Memberikan Laporan LKjIP yang terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atas kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/evaluasi berjalan	4 Pada penutup LKjIP terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atas kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/evaluasi berjalan	4 Memberikan Penjelasan Rencana Aksi untuk Tahun berikutnya atas Evaluasi Tahun Berjalan
5	Untuk Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja organisasi pada pegawai secara implisit dan eksplisit melalui penyusunan rekomendasi jika terdapat	5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja organisasi pada pegawai secara implisit dan eksplisit melalui penyusunan	5 Membentuk Agen Perubahan pada Kantor Kecamatan Paringin Selatan

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	
	kendala/ hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovasi/adaftif	rekomendasi jika terdapat kendala/ hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovasi/adaftif		
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
1	-	1	1	-

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024 ini disusun. LKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan juga sebagai pelaksanaan dari Permenpan No.53 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja. Selain itu LKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Paringin Selatan secara menyeluruh.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Kantor Kecamatan Paringin Selatan memiliki 1 (satu) indikator IKU dan 4 (empat) sasaran strategis, 6 (enam) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan yang harus dilaksanakan. Pencapaian Sasaran Program Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan pada Kantor Kecamatan Paringin Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.1.1. Rangkuman Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja Kecamatan Paringin Selatan untuk Tahun 2024
berkategori **Berhasil**.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	88	84,54	96,06%	262.577.300	251.210.000	95,671%
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasya-rakatan Desa (LKD) yang Aktif	75	75	100,00%	1.715.693.500	1.662.422.700	96,90%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100,00%	152.895.000	150.917.000	98,71%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100,00%	92.050.000	90.750.000	98,59%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100,00%	166.753.600	164.563.600	98,69%

Hasil analisis program-program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian penyerapan anggaran 83,86%;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian penyerapan anggaran 95,67%;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian penyerapan anggaran 96,14%.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian penyerapan anggaran 98,70%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian penyerapan anggaran 98,87%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian penyerapan anggaran 98,65%.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Kantor Kecamatan Paringin Selatan memiliki indikator Kinerja Utama (IKU) dan Terdapat 6 (enam) program , 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang harus dilaksanakan. Pencapaian Sasaran Program Strategis dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kantor Kecamatan Paringin Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		83,86	Cukup Berhasil
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	Sangat Berhasil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	99,88	Sangat Berhasil
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		78,61	Kurang Berhasil

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	78,34	Kurang Berhasil
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	99,99	Sangat Berhasil
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		97,93	Berhasil
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	97,93	Berhasil
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		99,82	Sangat Berhasil
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	97,96	Berhasil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	99,26	Sangat Berhasil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	99,89	Sangat Berhasil
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92,47	Berhasil
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	92,47	Berhasil
	Pengadaan Mebel	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	98,05	Berhasil
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	95,20	Berhasil
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88,55	Cukup Berhasil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubbag Umum dan	79,58	Kurang Berhasil

		Kepegawaian		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	91,42	Berhasil
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92,47	Berhasil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	92,47	Kurang Berhasil
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		95,67	Berhasil
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		95,67	Sangat Berhasil
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kasi Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial	96,87	Berhasil
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Wilayah Kecamatan	Kasi Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial	95,33	Berhasil
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		96,14	Berhasil
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		99,39	Berhasil
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	100	Sangat Berhasil

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	94,39	Berhasil
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Batu Piring	96,05	Berhasil
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Batu Piring	97,41	Berhasil
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Batu Piring	100	Sangat Berhasil
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Piring	95,97	Berhasil
	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Batu Piring	94,79	Berhasil
11	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		97,25	Berhasil
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	97,25	Berhasil
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		98,70	Berhasil
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		98,70	Sangat Berhasil
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	98,70	Berhasil
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN		98,87	Berhasil

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		98,87	Berhasil
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	98,87	Berhasil
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		98,65	Berhasil
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		98,65	Berhasil
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	97,24	Berhasil
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kasi Pembangunan	98,69	Berhasil
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kasi Pemerintahan	100	Sangat Berhasil
JUMLAH			87,35	Cukup Berhasil

4.1.2. Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan yang akan dilakukan dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2024 ini maka dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan datang
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kantor Kecamatan Paringin Selatan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel sehingga visi "*Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional, Responsif dan Akuntabel berorientasi pelayanan prima untuk masyarakat*" dapat tercapai.

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Paringin Selatan tahun anggaran 2024 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi Kantor Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja yang diperoleh pada Tahun 2024 ini adalah merupakan Hasil Pelaksanaan Tupoksi yang Optimal dari Seluruh Jajaran Aparat Kecamatan Paringin Selatan. Walaupun masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paringin Selatan ini disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk Peningkatan Kinerja Aparat Kantor Kecamatan Paringin Selatan di tahun-tahun yang akan datang.

Paringin Selatan, Januari 2025

CAMAT PARINGIN SELATAN,



RIZA KURNIAWAN, S.STP., M.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19870328 200602 1 001

